

**MANAJEMEN RETRIBUSI PARKIR OLEH DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PEKANBARU**

OLEH

Auldia Rahman/ 1301113902

(auldiarahmaner@gmail.com)

Pembimbing : Mayarni, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

Abstract

The parking levy management in Pekanbaru city being held for regulate parking area and to increase local revenue Pekanbaru city. However, in it's implementation still have a discrepancy with the valid provision and the attainment of total parking levy still far from the target. As a government institution that manages the parking levy in Pekanbaru city, Departement of Transportation of Pekanbaru be liable for manage parking levy and support to increase local revenue. The purpose of research is to find out how the parking levy management being manage by Departement of Transportation of Pekanbaru City.

In the theory of George R. Terry, there are four functions of management i.e. planning, organizing, directioning, and observating. The research used descriptive qualitative method with the purposive sampling technique. Informants in this study are the Departement of Transportation Pekanbaru City, Parking Coordinator officer, Parking officer, and the users of parking area.

The results of research of qualitative descriptive analysis can be concluded, Parking Levy Management by Departement of Transportation Pekanbaru Cityn did not function maximally because there are still unit of work that did not carry out theirs duties and authority appropriate provisions and did not achieve the target of parking levy. Factors that affect the parking levy management in Pekanbaru city was consciousness factor, time factor, and service factor.

Keyword : Management, Parking Levy

1.1 Latar Belakang

Kota Pekanbaru yang merupakan ibukota dari Provinsi Riau, dan juga merupakan salah satu kota besar yang sedang mengalami perkembangan yang pesat, salah satunya di bidang transportasi darat, terkhusus kendaraan bermotor. Parkir merupakan bagian yang terpenting bagi setiap pengguna kendaraan, karena kendaraan yang digunakan akan berhenti ditempat tertentu sesuai keinginan atau kebutuhan pengguna jasa parkir dalam jangka waktu tertentu. Selain penataan parkir, adanya parkir dapat mempengaruhi penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengelolaan perparkiran pada Kota Pekanbaru, melalui Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mengatur akan keberadaan dimana ataupun tempat-tempat yang boleh dan tidak boleh digunakan untuk parkir. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru, menyebutkan bahwa segala hal yang berhubungan dengan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan seperti angkutan orang, angkutan barang, terminal penumpang, terminal barang, pool kendaraan, agen, fasilitas lalu lintas, pengelolaan parkir, dan lain sebagainya terkhusus dalam Kota Pekanbaru. Sedangkan fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.

Tata ruang kota, suatu hal penting bagi sebuah kota metropolitan. Jika tata ruang kota tidaklah tertata maka akan banyak timbul kesemrautan, dalam hal ini lokasi parkir pun harus diperhatikan dalam tata ruang kota. Kemudian demi kenyamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran lalu lintas menjadi salah satu hal yang paling rentan terjadi dalam hal lokasi parkir, namun dalam mewujudkan hal tersebut berbagai

upaya yang dilakukan untuk menghindari diinginkan dan kekacauan. Walau lokasi parkir sesuai dengan apa yang telah disampaikan diatas, ada kalanya penempatan lokasi parkir haruslah memudahkan bagi pengguna jasa parkir untuk mengatur posisi kendaraannya atau pun untuk mencapai tempat tujuannya. Sebagaimana yang dijelaskan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Kota Pekanbaru, Pasal 244 Penyelenggara dan Pengelolaan fasilitas parkir berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan pelayanan :

1. Mengatur lalu lintas kendaraan keluar masuk serta penataan parkir;
2. Memberikan karcis retribusi parkir dan menerima pembayaran;
3. Menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan.

Penggunaan fasilitas parkir oleh para pengguna jasa parkir akan dikenakan biaya parkir oleh juru parkir yang disebut retribusi parkir. Adanya fasilitas namun tidak diikuti dengan pelayanan yang baik maka dibentuklah Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan retribusi parkir. Dalam hal ini Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Parkir Kota Pekanbaru menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Retribusi Parkir. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah satuan pedoman tahapan kerja untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kerja yang dibuat secara sistematis mengenai proses penyelenggaraan administrasi. Pengelolaan retribusi parkir di Kota Pekanbaru dalam setiap satuan unit kerja yang telah ditunjuk oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru akan melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, yaitu diantaranya:

1. Koordinator Parkir
 - a. Mengajukan permohonan pengelolaan area parkir kepada

- Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
 - b. Mengambil uang setoran retribusi parkir dari Juru Parkir
 - c. Mengawasi pelaksanaan tugas Juru Parkir
 - d. Menjaga keamanan dan ketertiban wilayah perkiraan yang disetujui
 - e. Menyetorkan setoran retribusi parkir kepada Juru Pungut Dinas Perhubungan
 - f. Melaporkan kendala/hambatan yang dihadapi dilapangan kepada Dinas Perhubungan.
2. Juru Parkir
 - a. Mengatur letak kendaraan sesuai area yang tersedia untuk lahan perkiraan
 - b. Memberikan karcis kepada setiap kendaraan yang parker
 - c. Memungut retribusi parkir kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku
 - d. Membantu mewujudkan ketertiban, kebersihan dan keamanan (K3) dilokasi parker
 - e. Menjaga kelancaran arus lalu lintas
 - f. Menyetor hasil pungutan parkir setiap harinya kepada Koordinator Parkir
 3. Tim Survey UPTD Parkir
 - a. Melakukan pemetaan survei lokasi parkir yang diajukan oleh calon Koordinator Parkir
 - b. Menentukan nilai retribusi parkir yang harus disetorkan oleh calon Koordinator Parkir
 - c. Melaporkan hasil survei lokasi parkir kepada kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan
 4. Juru Pungut
 - a. Mengawasi pelaksanaan parkir dilapangan
 - b. Mengecek dan melaporkan kondisi riil yang dihadapi Koordinator

- Parkir dilapangan terhadap kendala yang dihadapi
 - c. Menyetorkan setoran retribusi parkir kepada Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan
5. Bendahara Penerimaan
 - a. Menerima setoran retribusi dari Juru Pungut Parkir (Petugas Dinas Perhubungan)
 - b. Melakukan penatausahaan keuangan penerimaan retribusi parker
 - c. Mengontrol dan mnegevaluasi penerimaan retribusi setiap hari/bulan/tahun
 - d. Menyetorkan penerimaan retribusi parkir kepada Kas Daerah Kota Pekanbaru
 - e. Membuat laporan keuangan penerimaan setiap hari/bulan/tahun untuk dilaporkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Bagian Keuangan Kantor Walikota Pekanbaru.

Penetapan tarif retribusi parkir juga disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 pasal 9 dijelaskan bahwa setiap pengguna jasa parkir akan dikenakan retribusi parkir dengan diberikannya bukti pembayaran berupa karcis yang telah ditetapkan dan berlaku hanya sekali saja hingga kendaraan tersebut keluar dari lokasi parkir.

Retribusi jasa umum salah satunya yaitu retribusi parkir, dalam hal memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Unit Pelayanan Teknik Dinas (UPTD) sebagai unit yang bertanggungjawab untuk mengelola parkir dan memungut retribusi parkir di Kota Pekanbaru dalam tiap tahunnya memiliki target yang berbeda dalam pendapatan retribusi parkir. Berikut data tentang Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Pekanbaru dari tahun 2012 sampai dengan 2016 :

Tabel 1.2 : Target dan Realisasi
Penerimaan Parkir Kota Pekanbaru

No	Tahun	Target (Rupiah)	Target Perubahan (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persentase (%)
1	2012	5.799.996.000	5.444.459.500	5.152.778.000	94,64%
2	2013	7.000.000.000	6.200.000.000	5.353.190.000	86,34%
3	2014	6.200.000.000	7.194.000.000	6.123.065.000	85,11%
4	2015	14.273.310.000	14.273.310.000	7.202.855.000	50,46%
5	2016	14.273.310.000	14.273.310.000	8.253.279.000	57,82%

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2017

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa ketidak stabilannya penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Pekanbaru dilihat dari tahun 2012 sampai tahun 2016, penerimaan retribusi parkir mengalami peningkatan namun yang terealisasi masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya masih banyak parkir liar, jika parkir tersebut dikelola oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan potensi untuk meningkatkan penerimaan retribusi parkir pun dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Retribusi Parkir disusun dalam rangka sebagai pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas atau wewenang dari setiap satuan unit kerja agar terhindar penyalahgunaan kekuasaan sehingga dalam pencapaian target penerimaan retribusi yang telah ditetapkan pun dapat tercapai. Namun pada pelaksanaannya masih ada satuan unit kerja yang tidak melaksanakan tugasnya berdasarkan SOP yang telah ditetapkan, seperti Juru Parkir yang tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir, hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi Koordinator Parkir kepada Juru Parkir,

sehingga banyak Juru Parkir yang tidak melaksanakan tugasnya berdasarkan SOP dan kemudian dalam memungut/menerima retribusi parkir Staf Penerima Retribusi Parkir atau Juru Pungut terkadang mengalami keterlambatan atau ketidaksesuaian waktu penerimaan retribusi parkir dari waktu yang telah ditentukan, hal ini disebabkan karena berbagai alasan dari Koordinator Parkir, baik ditemui ataupun sulit dihubungi pada saat penerimaan/pemungutan retribusi parkir kepada Juru Pungut Retribusi Parkir. Selain itu permasalahan yang muncul ketika di waktu tertentu, seperti pada Bulan Ramadhan ada beberapa Koordinator Parkir yang mengajukan pengurangan penyeteroran retribusi parkir dikarenakan dari titik lokasi parkir yang dikelola tidak beroperasi seperti hari biasa, misalnya pada titik lokasi parkir rumah makan. Pada saat Bulan Ramadhan banyak rumah makan yang hanya buka pada sore hari sampai malam hari, beda pada hari biasa di luar Bulan Ramadhan yang buka dari pagi sampai malam. Selain itu untuk membuktikan keseriusan pemerintah dalam pelayanannya kepada masyarakat diperlukan kejelasan bahwa perlunya karcis parkir, hal ini berguna selain mempermudah bagi pemerintah dalam menerima/menghitung jumlah setoran retribusi parkir, tetapi bagi masyarakat karcis parkir merupakan bentuk kejelasan tarif parkir yang harus dibayarkan kepada Juru Parkir sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah.

Berdasarkan fenomena yang telah diasampaikan, maka diperlukan manajemen atau penegasan dalam pengelolaan retribusi parkir yang baik. Maka daripada itu UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru perlu melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan retribusi parkir yang telah ditetapkan. Karena keberhasilan dalam pencapaian target retribusi parkir dapat terlaksana melalui koordinasi yang baik disetiap satuan unit kerja suatu lembaga.

Diterapkannya SOP dalam masing-masing bagian suatu kelembagaan agar administrasi yang baik dapat berjalan dengan prosedur yang telah ditetapkan dan untuk menghindari berbagai bentuk penyimpangan dan jika terjadi penyimpangan segera dapat ditemui berbagai akar permasalahannya.

Dari fenomena yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Manajemen Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan pokok Sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru?.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan manajemen retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang di dapat selama perkuliahan dan untuk mengembangkan pemahaman disertai dengan pemecahan masalah serta melatih

penulis dalam menerapkan teori-teori dan pengalaman yang di dapat selama perkuliahan.

b. Secara praktis

1. Sebagai bentuk pengembangan dan pemikiran, yakni sebagai penerapan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan. Dalam hal ini merupakan bagian disiplin Ilmu Administrasi Publik.
2. Sebagai bahan pertimbangan, masukan, dan bahan informasi dalam manajemen retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

1.4 Konsep Teori

1. Manajemen

Pada awalnya kata “manage” ini diadopsi dari bahasa Italia, *maneggio*, dari bahasa latin, *managiare*, dari kata *manus*, artinya tangan. Kata “to manage”, sendiri artinya 1) mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola; 2) memperlakukan. Dari kata *manage* (kata kerja) ini terbentuklah kata-kata lainnya seperti *manager* (kata benda), artinya pengelola/pemimpin usaha; *managerial* (kata sifat), artinya yang berhubungan dengan kepemimpinan/pengelolaan; *managing* (kata sifat), artinya pelaksana, eks: *managing director* = direktur pelaksana; *manageable* (kata sifat), artinya dapat diatur/dikendalikan; dan *management*.

Ritonga (2015:26)

Haiman dalam **Manullang (2009:3)** mengatakan bahwa manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.

Terry (2006:4) mendefinisikan bahwa manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran

yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Stoner dalam **Amirullah, dkk (2004:7)**, mendefinisikan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan, penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut **Hasibuan dalam Marnis (2008:3)** manajemen merupakan ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut **Farland dalam Brantas (2009:4)** mendefinisikan manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-masud yang nyata.

Menurut **Dewi (2011:44)** manajemen didukung oleh beberapa sarana mutlak harus ada, atau disebut juga *The Six M in Management*, meliputi, *Man* (faktor manusia), *Money* (anggaran), *Method* (sistem kerja), *Materials*, *Mechines*, *Market* (pemasaran).

Secara lebih singkat dapat disimpulkan bahwa manajemen memiliki cakupan lebih luas dari pada pengelolaan. Sementara pengelolaan merupakan bagian dari proses manajemen. Penulis mengambil pandangan dari salah satu ahli manajemen yang bernama **George R. Terry (2005 : 9)** dalam bukunya *Asas-Asas Manajemen* terdapat empat fungsi manajemen sebagai berikut :

a. Perencanaan (*Planning*)

Terry (2006:163) mendefinisikan perencanaan merupakan tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan assumsi-assumsi mengenai masa yang akan datang

dalam hal memvisualisasi serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan.

Yahya (2006:33) mendefinisikan perencanaan adalah suatu proses yang tidak berakhir bila rencana tersebut telah ditetapkan, rencana harus diimplementasikan. Salah satu penting perencanaan adalah pembuatan keputusan (*decision making*), proses pengembangan dan penyeleksian sekumpulan kegiatan untuk memecahkan suatu masalah tertentu.

Hasibuan (2005:40) perencanaan adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada.

Menurut **Allen dalam Hasibuan (2005:92)** perencanaan adalah menentukan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Siagian (2005:36) perencanaan merupakan usaha sadar dan pengambilan keputusan yang telah diperhitungkan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa depan dalam dan oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Kast dan Rosenzweig dalam Syaffie (1999:75) mengatakan bahwa perencanaan adalah suatu kegiatan yang terintegrasi, yang bertujuan untuk memaksimalkan efektivitas keseluruhan usaha, sebagai suatu sistem sesuai dengan tujuan organisasi yang bersangkutan.

Jadi, masalah perencanaan adalah masalah “memilih” yang terbaik dari beberapa alternatif yang ada. Perencanaan adalah pekerjaan mental untuk memilih sasaran, kebijakan, prosedur, dan program yang diperlukan untuk mencapai apa yang diinginkan pada masa yang akan datang.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Dengan *organizing* dimaksud mengelompokkan kegiatan yang diperlukan, yakni penetapan susunan organisasi serta tugas dan fungsi-fungsi dari setiap unit yang ada dalam organisasi, serta menetapkan kedudukan dan sifat hubungan antara masing-masing unit tersebut.

Terry (2006:233) pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien, dan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

Yahya (2006:33) pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur, serta membagi tugas atau pekerjaan diantara para anggota organisasi, agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien.

Handoko(2003:167) mendefinisikan pengorganisasian adalah proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya.

Hasibuan (2005:40) mendefinisikan pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.

Siagian (2005:60) pengorganisasian ialah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, serta wewenang dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang

dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan yang utuh dan bulat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

c. Penggerakkan/Pengarahan (*Actuating*)

Terry (2006:313) penggerakkan merupakan usaha untuk menggerakkan anggota-anggota kelompok demikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan yang bersangkutan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu ingin mencapai sasaran tersebut.

Yahya (2006:111) secara umum, pengarahan dapat diberikan batasan sebagai suatu proses pembimbingan, pemberian petunjuk, dan instruksi kepada bawahan agar mereka bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Siagian (2005:95) penggerakan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan usaha, cara, teknik, dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien, efektif, dan ekonomis.

Jadi pengarahan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk membimbing, menggerakkan, mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan sesuatu kegiatan usaha.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Menurut **Fayol** dalam **Yahya (2006:12)** pengawasan berarti penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Terry dalam **Syafiie (1999:83)** pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan yang harus dicapai yaitu standart, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan

sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standart (ukuran).

Handoko(2003:359) mendefinisikan pengawasan adalah sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan.

Menurut **Ritonga (2015:79)** fungsi manajemen tidak akan efektif tanpa fungsi pengawasan (*controlling*) atau sekarang banyak digunakan istilah pengendalian. Pengawasan dalam istilah Manajemen Dakwah dikatakan dengan *riqabah* atau *tahsib* adalah penemuan dan penerapan cara serta peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

2. Administrasi Keuangan

Allen D.Manvel dalam **Abdullah (2002:6)** Administrasi keuangan menyangkut lima segi kebijaksanaan nasional yang terpisah-pisah yaitu :

- a. Kebijakan ekonomi
- b. Kebijakan utangKebijaksanaan pendapatan Kebijakan pengeluaran
- c. Kebijakan pelaksanaan

1) Keuangan Negara

Menurut **Atmaja (2005:24)** ada 3 interpretasi mengenai pengertian keuangan negara yaitu :

- a) Keuangan negara adalah semua aspek yang mencakup dalam APBN yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR setiap tahunnya.
- b) Berlaitan dengan metode dogmatis dan restriktif yang diungkapkan sebelumnya, bahwa pengertian keuangan negara dijelaskan dalam arti luas yaitu dengan segala kegiatan atau aktifitas yang berkaitan erat dengan uang yang diterima atau dibentuk berdasarkan hak istimewa negara untuk kepentingan publik.

- c) Pengertian keuangan negara dalam arti luas, yakni termasuk didalamnya, keuangan yang dalam APBN, APBD, BUMN/D dan pada hakikatnya seluruh kekayaan negara yang merupakan objek pemeriksaan dan pengawasan. Pengertian ini berdasarkan pada penafsiran sistematis dan teologis untuk mengetahui sistem pengawasan dan pemeriksaan pertanggungjawaban.

2) Keuangan Daerah

Menurut**Akbar (2002:23)** keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya semua bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran dan pendapatan belanja daerah.

Menurut **Halim (2001:19)**, mengartikan keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai, dengan demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara dan daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

3. Retribusi

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut **Yani (2002:55)** “daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.”

Siahaan (2005:5) retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang

diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung yaitu hanya membayar retribusi yang menikmati balas dari Negara.

Menurut **Siahaan (2005:6)** retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sedangkan jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau, kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.5 METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan permasalahan yang ada memberikan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan. Pemecahan masalah yang dilakukan dengan cara menggambarkan suatu keadaan, data, status fenomena berdasarkan fakta-fakta yang ada.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada salah satu instansi pemerintahan daerah di Kota Pekanbaru yaitu pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang merupakan lembaga yang diberi kewenangan dari Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan manajemen retribusi parkir.

1. Informan penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan sebagai informasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian dan mengetahui secara lebih mendalam mengenai permasalahan yang

akan diteliti yaitu tentang Manajemen Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan penelitian melalui key person. Adapun yang menjadi informan kunci (key person) dalam penelitian ini sebagai berikut Kepala Unit Pelayanan Teknik Dinas (UPTD) Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Juru Pungut, Bendahara Penerimaan Retribusi Parkir, Koordinator Parkir, Juru Parkir, Masyarakat pengguna jasa parkir.

2. Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yang akan dianalisa dalam hasil penelitian nantinya melalui wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti tentang manajemen retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
2. Data Sekunder adalah data pendukung atau data yang diperoleh dari pihak kedua untuk melengkapi data primer, seperti :
 - a. Peraturan Daerah No. 2 Tahun tentang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru
 - b. Peraturan Daerah No. 3 Tahun tentang Retribusi Pelayan di Bidang Perhubungan Darat.
 - c. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Retribusi Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi

Menurut **Nazir (2005:175)** pengumpulan data dengan observasi atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Teknik ini biasanya diartikan sebagai pengamatan

dari sistem fenomena yang diselidiki, dimana observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi langsung ke lokasi penelitian untuk melihat bagaimana pelaksanaan manajemen retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

b. Wawancara

Menurut **Mulyana (2004:180)** wawancara adalah komunikasi antara dua orang atau lebih yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara digunakan melalui petunjuk umum wawancara yang menggunakan petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat seluruhnya tercakup. Adapun dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan yaitu tentang manajemen retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

c. Dokumentasi

Suatu teknik yang digunakan dengan mengumpulkan literature untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

d. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyerderhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data yang digunakan adalah analisis yang bersifat penalaran mengenai fenomena-fenomena yang akan diteliti, setelah data dikumpulkan melalui teknik observasi dan wawancara kemudian penulis menganalisis data secara deskriptif kualitatif.

Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007:4) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Untuk

meningkatkan tingkat kepercayaan dan devaliditas terhadap penelitian ini, peneliti melakukan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan memaparkan hasil penelitian yang penulis lakukan selama di lapangan dengan judul Manajemen Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Dengan melakukan analisis fenomena di lapangan menggunakan teori George R. Terry.

A. *Perencanaan (Planning)*

Perencanaan dalam suatu manajemen sangat diperlukan sebelum pelaksanaan suatu kegiatan, karena melalui perencanaan langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan dalam mencapai tujuan telah dirumuskan sebelumnya. UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pengelolaan retribusi parkir, tidak bisa memungut retribusi parkir dan meminta retribusi parkir secara sembarangan, namun dalam hal ini UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai perencanaan dalam mencapai target retribusi parkir di Kota Pekanbaru. Sehingga dalam pemungutan retribusi parkir tersebut akan menjadi sebuah motivasi dan kejelasan dalam pencapaiannya meningkatkan PAD. Perencanaan dalam pengelolaan retribusi parkir Kota Pekanbaru, UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru telah merencanakan segala hal berkaitan dengan tugas dan wewenang mereka, namun dalam pelaksanaan mereka memerlukan proses sehingga perencanaan yang telah disusun dapat dijalankan dengan seharusnya. Target perolehan retribusi secara keseluruhan di Kota Pekanbaru oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru setiap tahunnya akan ditentukan, hal ini merupakan bagian dari strategi Dinas Perhubungan Kota

Pekanbaru khususnya UPTD Parkir dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru. Penetapan target retribusi di Kota Pekanbaru, melalui berbagai pertimbangan kondisi yang sebelumnya dan dikemungkinan yang akan terjadi dalam pengelolaan parkir di Kota Pekanbaru sehingga dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dari UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dapat membantu meningkatkan PAD Kota Pekanbaru sesuai kemampuan. Dalam hal peningkatan perolehan PAD Kota Pekanbaru UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru juga terus menggali potensi retribusi parkir baik terhadap parkir yang telah ada ataupun terhadap lokasi yang memiliki potensi yang memungkinkan untuk termasuk dalam penarikan retribusi parkir di Kota Pekanbaru dengan bantuan dari masyarakat. Sehingga pencapaian target retribusi parkir di Kota Pekanbaru dapat dicapai sesuai dengan perencanaan. Pelaksanaan tugas dalam pengelolaan retribusi parkir oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melalui penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) membuktikan adanya perencanaan kerja yang akan dilaksanakan sehingga dapat menjadi panduan kerja bagi pegawai atau satuan unit kerja yang terlibat dalam pengelolaan retribusi parkir di Kota Pekanbaru.

Perencanaan merupakan suatu proses yang penting dalam sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya. Dalam hal ini UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menunjukkan adanya perencanaan yang mendukung dalam perolehan PAD dan juga dalam melaksanakan tugas dari setiap satuan unit kerja dalam pengelolaan retribusi parkir di Kota Pekanbaru.

B. Pengorganisasian

Pengorganisasian yaitu kegiatan pembagian kerja, pengelompokkan dan

pengaturan kegiatan atas orang-orang yang berkaitan dengan organisasi tersebut untuk memudahkan, meringankan, serta memperjelas dari tugas dan wewenang mereka, sehingga tidak terjadi pembauran atau kekacauan dan pencapaian tujuan dapat terwujud. Pengorganisasian secara tidak langsung menempatkan orang-orang berdasarkan kemampuan dan keahliannya sehingga memudahkannya dalam menyelesaikan tugasnya. Melalui pengorganisasian dapat mempermudah pelaksanaan rencana-rencana yang telah ditetapkan. UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam pengelolaan retribusi parkir Kota Pekanbaru memiliki pembagian tugas dan wewenang yang terdiri dari berbagai unit kerja, untuk memperjelas tugas dan wewenang dari pembagian kerja tersebut, maka UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, membentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) dan melaksanakannya agar kejelasan dari pembagian tugas dan wewenang tersebut lebih jelas, sehingga menjadi pedoman kerja bagi setiap satuan unit kerja. Pengelolaan retribusi parkir di Kota Pekanbaru dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan parkir di Kota Pekanbaru dengan persyaratan yang ditentukan oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Hingga disetujui dan mendapat Surat Perintah Tugas (SPT) dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, barulah masyarakat tersebut resmi menjadi Koordinator Parkir dan menjalankan tugasnya.

Pengelolaan retribusi parkir oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sudah melaksanakan pengorganisasian yang sudah cukup baik, sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir sudah memperoleh total retribusi parkir di Kota Pekanbaru meningkat

walaupun masih belum mencapai target yang ditentukan.

C. Penggerakan/Pengarahan

Penggerakan/pengarahan merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam sebuah organisasi dalam mencapai tujuan dengan cara memberi motivasi atau dorongan, memberi arahan, bimbingan dan membangkitkan kesadaran seluruh atau sebagian dari pihak-pihak atau orang-orang yang berada dalam organisasi tersebut.

Pengelolaan retribusi parkir oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru diperlukannya penggerakkan/pengarahan yang lebih, hal ini dikarenakan terlibatnya pihak luar Dinas Perhubungan seperti Koordinator Parkir dan Juru Parkir yang terkadang kurangnya kesadaran mereka untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Penggerakan/pengarahan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam pemberian arahan mempunyai tahapan yang harus dilewati bagi yang lalai atau melanggarnya, suatu arahan harus bersifat tegas kepada yang melanggarnya, sehingga tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Banyaknya jumlah Koordinator Parkir di Kota Pekanbaru dibutuhkan koordinasi yang baik, sehingga dalam pemungutan retribusi oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan dapat berjalan dengan baik. Namun pada kenyataannya masih ditemukan kekurangan dalam koordinasi antara UPTD Parkir Dinas Perhubungan dengan Koordinator Parkir. Hal ini terjadi karena UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan personil yang terbatas mengalami permasalahan komunikasi dengan Koordinator Parkir. Hal ini jugadapatmempengaruhi kinerja dari kedua belah pihak dan juga dapat mempengaruhi target retribusi parkir.

D. Pengawasan

Pengawasan diperlukan dalam sebuah pengelolaan ataupun manajemen, melalui pengawasan, dapat dilihat perencanaan sudah berjalan semestinya atau belum. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pengelolaan retribusi parkir oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai instansi pemerintah daerah yang mengurus perpajakan Kota Pekanbaru, memiliki tugas dan wewenang diantaranya yaitu membantu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan melakukan pengawasan terhadap perpajakan di kota. Tujuan dari UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melakukan pengawasan yaitu diantaranya untuk menertibkan parkir-parkir yang ada di kota sehingga tidak berdampak buruk bagi masyarakat. Pelaksanaan pengawasan ini dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda), Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Surat Perintah Tugas (SPT). Pedoman pengawasan perpajakan di Kota Pekanbaru oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Pekanbaru, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2009 tentang retribusi pelayanan di bidang perhubungan darat. Kemudian untuk santunan unit kerja pengawasan dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Namun terkhusus untuk Koordinator Parkir pedoman tambahan untuk pengawasan yaitu berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) yang berlaku, dikarenakan dalam SPT ini harus diperbaharui setiap 3 bulan sekali.

Pelaksanaan pengawasan di lapangan dilakukan, hal ini merupakan bentuk nyata dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan perparkiran di Kota Pekanbaru, pengawasan dilakukan oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru ataupun oleh Koordinator Parkir. Adapaun pengawasan secara langsung di lapangan yaitu salah satu caranya dengan patroli setiap hari keliling Kota Pekanbaru. Kemudian pengawasan juga dilakukan oleh Koordinator Parkir.

Walaupun pengawasan sebenarnya sudah dilakukan, tetapi kenyataannya masih terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa Juru Parkir. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengawasan di lapangan masih belum optimal dilakukan oleh kedua belah pihak.

E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Retribusi Parkir oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Faktor kesadaran, Kesadaran merupakan suatu proses berpikir melalui metode renungan, ketenangan, ketetapan hati, dan keseimbangan dalam jiwanya sebagai pangkal tolak untuk peruatan dan tindakan yang akan dilakukan kemudian. Adanya kesadaran dari pegawai mengenai tindakan terhadap tugas/pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya akan membawa pengaruh yang positif dan menimbulkan pelayanan yang baik.

Pengelolaan retribusi parkir yang akan dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang terdapat pada UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (bagian internal atau pun bagian eksternal) dalam pelaksanaan tugasnya tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan jikalau dari sumber daya manusianya tidak memiliki kesadaran akan tugas dan tanggungjawab masing-masing. Salah satu upaya dalam meningkatkan kesadaran para

sumber daya manusia yang ada dalam UPDT Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yaitu berasal dari pimpinannya.

Pelaksanaan tugas dan wewenang dari salah satuan unit kerja masih terdapat kekurangan, sehingga secara tidak langsung banyaknya terjadi pelanggaran yang membuat masyarakat tidak nyaman. Oleh karena itu dibutuhkan perhatian lebih dalam pengawasan Juru Parkir.

Faktor waktu, pengelolaan retribusi parkir oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru juga dipengaruhi oleh waktu, dalam setiap pelaksanaan kegiatan dibutuhkan waktu untuk pencapaian tujuan yang diinginkan. Dengan memanfaatkan waktu dapat memaksimalkan segala kegiatan dan dapat memperkirakan apa yang harus dan tidak harus dilakukan. Namun pada pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir di Kota Pekanbaru beberapa satuan unit kerja masih terkendala dengan waktu. Seperti dalam penyetoran retribusi parkir oleh Koordinator Parkir yang tidak tepat waktu. Adapun keterlambatan itu disebabkan oleh beberapa kondisi, sehingga penyetoran retribusi parkir dari Koordinator Parkir kepada UPTD Parkir Dinas Perhubungan. Dalam mencapai target retribusi parkir baik oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan, Koordinator Parkir dan Juru Parkir akan dipengaruhi oleh waktu, misalnya ketika memasuki musim hujan ataupun memasuki bulan Ramadhan, sehingga pada waktu tersebut pendapatan retribusi parkir akan berpengaruh secara tidak langsung. Kondisi alam pada waktu tertentu akan mengakibatkan penurunan dalam pencapaian retribusi parkir. Untuk itu UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dituntut untuk benar-benar memperhatikan dalam penetapan target retribusi parkir sebaik-baik mungkin sehingga, dalam pencapaiannya tidak jauh dibawah target yang telah ditetapkan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Manajemen Retribusi Parkir oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan pengelolaan manajemen retribusi parkir di Kota Pekanbaru, berdasarkan perencanaan sudah dirancang sebaik mungkin, sehingga dalam pencapaian target retribusi setiap tahunnya sudah mengalami peningkatan namun masih jauh dari target yang ditetapkan. Selain itu dalam perencanaan di lapangan sudah cukup baik. Berdasarkan pengorganisasian, UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sudah melaksanakan pengorganisasian dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sedangkan berdasarkan peggerakkan/pengarahan, UPTD Parkir Dinas Perhubungan masih memiliki keterbatasan, diantaranya terbatasnya sumber daya manusia pada internal UPTD (pegawai dinas) dalam mengendalikan atau mengontrol bagian eksternal UPTD (Koordinator Parkir dan Juru Parkir) sehingga bagian internal UPTD kewalahan. Dan terakhir berdasarkan pengawasan, yaitu masih belum optimalnya pengawasan yang terjadi dalam pengelolaan retribusi parkir. Sehingga masih adanya satuan unit kerja yang melanggar atau tidak paham akan tugas dan wewenang mereka berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Retribusi Parkir oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil penelitian penulis dalam pengelolaan manajemen retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru masih belum maksimal, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu, faktor kesadaran dari beberapa satuan unit kerja yang masih belum paham atau lalai akan tugas dan

wewenangnya sehingga akan mempengaruhi dalam perolehan target retribusi parkir dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Faktor waktu, hal ini mempengaruhi karena dalam saat tertentu pendapatan retribusi parkir mengalami penurunan sehingga tidak tercapai target retribusi yang telah ditetapkan. Dan kemudian faktor sarana pelayanan, dalam pengelolaan retribusi parkir di Kota Pekanbaru tidak saja terfokus dalam pencapaian target retribusi parkir namun juga mengutamakan dalam pelayanan, namun berdasarkan penelitian penulis, sarana pelayanan di lokasi parkir masih belum maksimal

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam pengelolaan retribusi parkir kembali memantau satuan unit kerja yang rawan akan ketidaksesuaian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sehingga pelaksanaan SOP yang telah ditetapkan berjalan dengan semestinya.
2. Meninjau kembali dalam hal penentuan target retribusi parkir berdasarkan kondisi area, keramaian dan bahkan keadaan alam (cuaca), sehingga untuk mencapai target retribusi yang semestinya dan untuk mencegah terbebannya pihak-pihak tertentu dalam pencapaian target retribusi parkir.
3. Perlunya peningkatan kesadaran akan tugas dan wewenang dari semua satuan unit kerja pengelolaan retribusi parkir, terutama bagian eksternal UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, yakni Koordinator Parkir dan Juru Parkir.
4. Memaksimalkan potensi yang ada dan menggali potensi yang memungkinkan

agar dapat membantu dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar. 2002. *Fungsi Manajemen Keuangan Daerah*. Majalah Pemeriksa Edisi No.87
- Amirullah, dkk. 2004. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung : Alfabeta
- Dewi, Irra Chrisyanti. 2011. *Pengantar Ilmu Administrasi*. Jakarta : Prestasi Pustaka
- Halim, Abdul. 2001. *Auditing: Dasar – Dasar Audit Laporan Keuangan*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta : BPEE Yogyakarta.
- Mamesah.1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta : Pustaka Utama.
- Manullang, M. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Marnis. 2008. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru : Unri Press
- Nataluddin, dkk. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP YKPN.
- Ritonga, Hasnun Januahari, 2015. *Manajemen Organisasi Pengantar Teori dan Praktek*, Medan : Perdana Publishing.
- Siahaan, P. Marihot. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo
- Siangian, Sondang P. 2005. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Siswanto. 2014. *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.

- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana , dkk. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Terry, George R. 2006. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung : PT.Alumni.
- Yahya, Yohannes. 2006. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Dokumen :

1. Stantar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Retribusi Parkir UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
2. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru.
3. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat.